

Deposito Rp 22 Miliar Pemerintah Semarang Diduga Raib di BTPN

SEMARANG — Deposito sebesar Rp 22 miliar milik Pemerintah Kota Semarang di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) cabang Semarang diduga raib. Pemerintah kota telah melaporkan dan menyerahkan sejumlah bukti kepemilikan deposito tersebut ke kepolisian resor setempat. "Laporan itu berikut bukti-bukti sertifikat deposito sejak Januari 2015," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang, Yudi

Mardiana, kemarin.

Yudi mengatakan laporan itu awalnya hanya diketahui oleh atasannya, yaitu Wali Kota Semarang. Kecurigaan atas raibnya uang deposito tersebut, menurut Yudi, berawal dari sikap BTPN yang menolak penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Semarang. Setiap awal tahun, pemerintah kota memanggil tujuh bank yang mendapat giliran menyimpan uang kas.

"Namun hanya BTPN yang tak datang," ujar dia.

BTPN tak bersedia datang saat penekanan nota kesepahaman karena merasa pemerintah kota tak menyimpan uang deposito ke bank tersebut. "Padahal, sertifikat deposito atas nama Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan BTPN masih tersimpan di kotak besi kami," ujar Yudi.

Ia menjamin bukti kepemilikan deposito milik pemerintah daerah benar-

benar asli. Hal tersebut dibuktikan lewat adanya laporan rekening koran atau transaksi keuangan yang selalu dikirim tanpa hambatan. "Bahkan bunga bank dari deposito BTPN itu dikirim dengan lancar ke Bank Jateng."

Adapun Corporate Communications Head BTPN, Eny Yuliati, menyatakan pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang ditangani Polda Jawa Tengah. Sebagai bank

nasional yang memiliki segudang reputasi dalam industri perbankan, menurut dia, BTPN menjalankan standar prosedur operasi dengan prinsip kehati-hatian. "Kami pastikan proses transaksi keuangan di BTPN memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh nasabah kami," ujar dia.

Sedangkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisariss Besar Lilik Darmanto,

menyatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan tentang sengketa sebuah bank dengan pemerintah Semarang. Namun ia menolak menyebutkan nama bank tersebut, dengan alasan kasus ini masih dalam penyelidikan. Dalam kasus ini, kata Lilik, kedua belah pihak sama-sama melapor. "Pemkot melapor ke Polrestabes, sementara pihak bank melapor ke Polda," ujarnya.

● EDI FAISOL | ANDI IBNU MASRI RUSLI |
SUKMA LOPPIES

